

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: **Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera**. Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yakni:

1. **Masyarakat NTB**, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. **Beriman**, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
3. **Berbudaya**, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4. **Berdayasaing**, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

5.2. Misi

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut diwujudkan melalui 7 Misi pembangunan, yakni:

1. **Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter**

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi pula oleh seberapa besar kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja dibentuk oleh kapasitas intelektual personal semata (*Intelektual Question/IQ*), namun lebih juga dipengaruhi oleh kualitas moral/budipekerti atau sering dinamakan *Spiritual Question/SQ*. Meletakkan pondasi budipekerti/moral masyarakat yang kokoh adalah modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan yang lebih baik. Hidup dalam atmosfer yang amat pluralitas secara sosial, budaya maupun agama memerlukan semangat dan komitmen yang kuat dalam toleransi dan kebersamaan, terlebih arus globalisasi telah menembus sekat-sekat geografis. lintas ruang dan waktu membuat masyarakat hidup dalam pergulatan sosial budaya yang bisa menggoyahkan jatidiri. *Cultural shock* dan kegamangan akan SDM yang memiliki kualitas spiritual dapat diantisipasi melalui pengembangan karakter masyarakat dengan membangun mental yang dilandasi nilai-nilai agama dan

mengembangkan semangat toleransi/harmonisasi dengan mengakui kebersamaan dalam keberagaman.

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

NTB terdiri dari 3 etnis besar yakni: Sasak, Sumbawa dan Mbojo dan beragam etnis lainnya. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Nusa Tenggara Barat tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/unik. Pada tingkat selanjutnya keunikan budaya dan kearifan lokal ini menjadi aset wisata alternatif melengkapi pesona keindahan alam pantai dan pegunungan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat.

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

Setelah pondasi budi pekerti/akhlak mulia yang ditopang oleh perkuatan sendi budaya dan kearifan lokal, maka menghadirkan pemerintahan yang baik dan kuat adalah tahapan berikutnya dalam rangka merengkuh perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kuat ditopang oleh birokrasi yang sehat, hukum yang ditegakkan, dan stabilitas keamanan bagi pembangunan. Reformasi birokrasi jalan menuju perkuatan hadirnya birokrasi yang kuat. Birokrasi ditempatkan sebagai institusi yang bersih dan melayani kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kualitas perencanaan yang makin partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi unsur birokrasi bersih dan melayani. Fasilitasi terhadap upaya penegakan hukum di daerah dan penciptaan rasa aman masyarakat, terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban modal dasar lainnya pembangunan dapat berjalan lancar dan baik.

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing

Sumberdaya manusia yang berdayasaing adalah harapan semua pihak. Sumberdaya manusia yang berdayasaing harus sehat, cerdas, mampu memenuhi kebutuhan jasmani-rohani serta mampu memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa abai keadilan gender. Kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, kesempatan memperoleh kehidupan yang layak

menjadi fokus peningkatan mutu sumberdaya manusia daerah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan memberdayakan posyandu, kaderisasi posyandu, mengembangkan motivator, meletakkan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya Generasi Emas NTB 2025, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan fokus bidang kesehatan. Pada bidang pendidikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, melanjutkan wajib belajar 9 tahun, meletakkan pondasi yang kuat bagi pendidikan universal, pengembangan pendidikan kejuruan dan non formal, pendidikan luar biasa dengan titik tolak peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Disamping hal tersebut, perhatian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak kalah pentingnya.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah

Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran.

6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Sentra aktivitas ekonomi maupun kepentingan pembangunan sosial harus didukung oleh ketersediaan pelayanan infrastruktur. Upaya pembangunan infrastruktur 5 tahun terakhir telah menyediakan berbagai infrastruktur yang lebih baik, tinggal bagaimana memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Fokus pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik. Daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Sebagai provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sekaligus daerah yang berada dalam *ring of fire* gunung berapi, perhatian terhadap ketersediaan, keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam harus dilakukan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dasar dalam mengalokasikan kegiatan pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam sekaligus menyiapkan masyarakat bila terjadi bencana adalah hal pokok dalam upaya pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Pertama: Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter	1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti	a. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam b. Berkembangnya kegiatan rumah ibadah c. Terwujudnya masyarakat yang tertib d. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama e. Tersedianya pemuka agama yang berkualitas f. Tersedianya siaran/informasi yang edukatif g. Tersedianya kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah
	2. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan	a. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai b. Tercegah berkembangnya paham radikal

	masyarakat	c. Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam
Kedua: Mengembangkan budaya dan kearifan lokal	1. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal	a. Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas b. Terwujudnya masyarakat/ budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif c. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif d. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional e. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal
	2. Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan lokal	a. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal b. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya c. Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal d. Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal e. Tersedia, terpelihara dan tersebar koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam
Ketiga: Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a. Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai b. Terwujudnya aparatur yang profesional c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah e. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	2. Meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat	a. Terwujudnya aturan hukum yang efektif b. Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional c. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai d. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkoba e. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba
	3. Meningkatkan profesionalitas	a. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel b. Tersedianya pelaku usaha yang profesional

	dunia usaha	
	4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah	a. Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
	5. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	b. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik
	6. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur	a. Terwujudnya pengawasan yang profesional
	7. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	a. Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab b. Tertatanya otonomi daerah c. Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif
	8. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum	a. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum b. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional c. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)
<i>Keempat:</i> Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender	a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas b. Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau c. Terwujudnya Generasi Emas 2025 d. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten e. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai f. Terwujudnya perempuan yang profesional

		<p>g. Terwujudnya prestasi olahraga</p> <p>h. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil</p>
	<p>2. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja</p>	<p>a. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai</p> <p>b. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional</p> <p>c. Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha</p> <p>d. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi</p>
<p>Kelima: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam</p>	<p>a. Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas</p> <p>b. Tersedianya data dan informasi potensi SDA</p> <p>c. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna</p> <p>d. Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan</p> <p>e. Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>f. Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata</p>
	<p>2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi</p>	<p>a. Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai</p> <p>b. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar</p> <p>c. Terwujudnya tenaga kerja terampil</p> <p>d. Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah</p>
	<p>3. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi</p>	<p>a. Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat</p> <p>b. Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>c. Terwujudnya ekspor daerah</p>
	<p>4. Meningkatkan sumber pendanaan</p>	<p>a. Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat</p> <p>b. Tersedianya sistem pelayanan PAD</p>

	daerah	c. Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya
	5. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah	a. Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai b. Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah
Keenam: Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang	1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	a. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berkualitas b. Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional c. Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai
	2. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah	a. Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang b. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan produktif
Ketujuh: Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH	a. Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas b. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan c. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup d. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) e. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari
	2. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana	a. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana

